

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Berita Hoaks**

Hoaks adalah informasi yang sengaja diolah atau dibuat dengan tujuan menipu atau memperdaya audiensnya. Sementara itu, orang yang menciptakan hoaks sadar bahwa informasi yang disampaikan tidak memiliki kebenaran. Hal ini bisa berupa konten palsu, pernyataan yang terdistorsi, atau gambaran yang salah. Motivasi di balik penyebaran hoaks bisa sangat bervariasi, namun secara umum, tujuannya melibatkan pengaruh sosial. Hoaks sering kali digunakan untuk mengarahkan opini publik, memanipulasi pandangan masyarakat, serta mengubah persepsi mereka terhadap isu tertentu. Selain itu, ada juga hoaks yang diciptakan semata-mata untuk hiburan, namun seringkali diarahkan untuk menguji kecerdasan dan kewaspadaan pengguna internet dan platform media sosial. Dengan kata lain, hoaks memiliki dampak yang signifikan dalam mempengaruhi persepsi, penilaian, dan bahkan tindakan orang-orang yang terpapar informasi tersebut [7].

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hoaks dijelaskan sebagai informasi palsu atau tidak dapat dipertanggungjawabkan yang disebarakan sebagai berita. Keberadaan berita hoaks dapat menimbulkan kerugian baik pada individu maupun kelompok, namun juga dapat memberikan keuntungan pada pihak tertentu. Dampak dari berita hoaks bisa mengakibatkan perpecahan dalam pandangan masyarakat, menyulitkan dalam membedakan kebenaran dan kebohongan, serta memicu respons emosional karena informasi yang tidak dapat dipercaya. Meskipun sering kali berita hoaks mirip dengan berita asli, namun dapat dikenali melalui kehati-hatian dan kemampuan untuk melakukan analisis yang teliti [8].

Membedakan antara informasi hoaks dan fakta dapat menjadi sebuah tantangan, terutama bagi individu yang memiliki pengalaman yang terbatas. Hoaks sering dijelaskan sebagai informasi yang tidak benar yang bertujuan untuk menyesatkan, dimana para penipu online menggunakan strategi tertentu untuk membingungkan masyarakat dalam membedakan antara kebenaran dan kebohongan. David Harley,

seorang Direktur Intelijen Malware, merincikan beberapa teknik pengenalan pesan hoaks dalam bukunya, "*Common Hoaxes and Chain Letters*". Salah satu strateginya adalah melihat penyebaran pesan yang menyebar melalui rantai, seperti ancaman yang mendesak untuk menyebarkan pesan tersebut kepada semua orang. Pesan juga sering kali tidak memiliki sumber yang terpercaya atau berisi tautan dan gambar yang tidak relevan dengan informasi yang diberikan. Selain itu, pesan hoaks sering kali memicu kecemasan atau panik pada pembacanya, dan seringkali pengirimnya tidak mengungkapkan identitasnya [9].

Menurut hasil survei dari *Katadata Insight Center* dan Kominfo, ada banyak individu yang mengakui telah menyebarkan informasi yang tidak benar atau berbau hoaks. Pada tahun 2021, sekitar 11,9 persen dari responden mengaku melakukan hal tersebut, sementara pada tahun 2020 jumlahnya sebesar 11,2 persen [10]. Data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Indeks literasi di Indonesia masih menunjukkan tingkat yang rendah secara nasional. Di tingkat provinsi, 9 provinsi masuk dalam kategori sedang, 24 provinsi tergolong rendah, dan 1 provinsi tergolong sangat rendah. Dalam gambaran nasional dan di tingkat provinsi, indeks literasi masih menunjukkan tingkat yang rendah.

Mahasiswa sebagai bagian dari generasi milenial cenderung sangat terkait dengan penggunaan teknologi, terutama ponsel pintar. Keterikatan mereka pada perangkat ini seringkali membuka pintu untuk paparan terhadap berbagai informasi, termasuk berita palsu atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena itu, kelemahan literasi di kalangan mahasiswa dapat membuat mereka rentan terhadap pengaruh negatif dari berita palsu. Untuk mengantisipasi dampak buruk ini, meningkatkan tingkat literasi sangat penting agar mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menanggapi berita palsu dengan bijak.

Pertama-tama, meningkatkan literasi informasi dapat membekali mahasiswa dengan keterampilan kritis untuk menilai kebenaran dan keandalan informasi yang mereka temui. Ini meliputi kemampuan untuk memeriksa sumber, mengidentifikasi

bias, dan mengenali tanda-tanda berita palsu. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang cara kerja media dan konten online, mahasiswa dapat lebih bijaksana dalam menilai informasi yang mereka terima.

Selanjutnya, edukasi tentang literasi digital dapat membantu mahasiswa memahami bagaimana algoritma media sosial dan mesin pencari dapat memengaruhi informasi yang mereka lihat. Mereka bisa belajar bagaimana memfilter informasi, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, serta mengidentifikasi konten yang mungkin dibuat hanya untuk menarik perhatian tanpa memperhatikan kebenaran.

Selain itu, mengajarkan keterampilan verifikasi fakta atau fact-checking juga sangat penting. Mahasiswa perlu dilatih untuk melakukan pengecekan sumber, membandingkan informasi dari berbagai sumber terpercaya, dan mengonfirmasi kebenaran sebelum menyebarkan atau mempercayai suatu informasi.

Pendidikan tentang etika digital juga tidak boleh diabaikan. Mahasiswa perlu memahami tanggung jawab dalam berbagi informasi, memahami dampak dari menyebarkan berita palsu, dan mempraktikkan perilaku online yang bertanggung jawab.

Meningkatkan literasi informasi di kalangan mahasiswa bukan hanya tentang memberikan pengetahuan, tetapi juga tentang memberdayakan mereka dengan keterampilan kritis dan pemahaman yang dapat membantu mereka menjadi konsumen informasi yang cerdas dan bertanggung jawab. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mahasiswa tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu dan dapat berkontribusi secara positif dalam lingkungan informasi digital yang kompleks saat ini.

## **2.2 Dampak Berita Hoaks**

Dalam era saat ini, interaksi politik di *platform* media sosial terus meningkat dengan cepat, namun kekhawatiran juga muncul seiring dengan maraknya sentimen yang berkaitan dengan ras, golongan, dan agama, serta adanya penyebaran berita palsu (hoaks) dan penyalahgunaan media sosial untuk ujaran kebencian. Hal ini

menguji keberagaman (kebhinekaan) yang selama ini menjadi pilar penting dalam masyarakat, terutama karena meningkatnya frekuensi ujaran kebencian yang semakin merajalela di *platform* media sosial. Tidak hanya itu, situasi ini semakin rumit karena penggunaan media sosial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang mendukung toleransi. Dinamika politik di Indonesia akhir-akhir ini dipengaruhi oleh konflik yang muncul akibat hoaks. Percakapan publik, baik yang terjadi di media konvensional maupun jejaring sosial, banyak membahas tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh hoaks, seperti memecah belah dan memicu pertikaian di tengah masyarakat [11].

Pemilu tahun 2014 telah menciptakan perpecahan di antara masyarakat yang mendukung kubu yang berbeda, yang berdampak pada konflik internal. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya ketegangan sosial di masyarakat Indonesia, yang saling bermusuhan di kubu-kubu yang berlawanan. Situasi ini semakin buruk karena tersebarnya berbagai informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, memperburuk interaksi sehari-hari antara masyarakat. UNESCO telah mengidentifikasi dampak dari penyebaran berita palsu di negara-negara maju. Sebagai contoh, pada tahun 2020, UNESCO melakukan penelitian terhadap penyebaran berita palsu atau hoaks dalam konteks pemilihan presiden Amerika Serikat. Penggunaan informasi palsu atau hoaks dalam arena politik merupakan sebuah strategi yang digunakan untuk mencapai kemenangan, baik di negara maju maupun negara berkembang [12].

Penyebaran hoaks memiliki dampak yang mencolok dalam kehidupan sosial, terutama dalam konteks kampanye pemilihan Presiden tahun 2019. Berita palsu yang terkait dengan isu Suku, Agama, Ras, dan Golongan (SARA) menyebar dengan cepat melalui platform media sosial. Dampaknya sangat besar pada individu yang terpapar oleh informasi palsu ini, menciptakan perasaan curiga, kebencian, dan sentiment negatif terhadap individu atau kelompok yang terkait dengan kategori SARA [13].

Fenomena yang sangat mencolok mengenai dampak berita palsu terjadi di belahan benua lain, terutama terkait penyebaran hoaks melalui *platform* media sosial saat kampanye presiden AS pada tahun 2016. Kecepatan penyebarannya sangat signifikan karena informasi palsu yang tersebar secara meluas sulit untuk dikendalikan di era digital saat ini. Saat ini, ada ribuan platform berbagi informasi yang memungkinkan penyebaran berita palsu atau informasi yang keliru dengan mudah dan cepat. Hal ini menciptakan tantangan besar dalam mengelola kebenaran informasi di dunia digital [14].

Dalam konteks kampanye politik, penyebaran hoaks yang berfokus pada isu-isu sensitif seperti SARA memiliki potensi untuk merusak persepsi masyarakat terhadap calon-calon tertentu, memicu konflik, serta memperdalam kesenjangan di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Sentimen negatif yang muncul dari informasi palsu ini juga dapat memicu ketegangan sosial, menghambat proses dialog yang sehat, dan bahkan memengaruhi opini serta keputusan politik masyarakat.

Penting untuk menyadari bahwa penyebaran hoaks tidak hanya mengancam kebenaran informasi, tetapi juga membawa dampak psikologis dan sosial yang berpotensi merusak stabilitas sosial serta kesatuan dalam masyarakat. Mewaspada dan membendung penyebaran hoaks menjadi suatu hal yang mendesak dalam upaya menjaga kestabilan dan keamanan sosial [13].

Sehingga disimpulkan bahwa dampak dari tindakan ini bisa terbagi menjadi dua, yaitu dampak yang menguntungkan dan merugikan. Sisi positifnya adalah, penyebar berita *hoax* akan mendapatkan bayaran dari pembuat berita. Namun, ini melanggar prinsip etika jurnalistik yang menekankan kejujuran dan akurasi dalam menyebarkan informasi. Di sisi lain, dampak negatifnya adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap berita secara keseluruhan. Jika situasi ini berlanjut, masyarakat akan menolak segala jenis berita dari semua sumber. Akibatnya, masyarakat akan mengemukakan pendapat pribadi tanpa mengacu pada

fakta yang sebenarnya. Apabila hal ini terjadi, kemungkinan terpecahnya masyarakat tanpa ada upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut [15].

### 2.3 Kasus Penyebaran Berita Hoaks

Sebuah fenomena yang viral di Facebook beberapa waktu lalu adalah klaim terkait penanaman *microchip* magnetik. Hal ini terjadi pada tahun 2020 saat kasus Covid-19 sedang meningkat dan vaksin menjadi topik perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagian percaya bahwa virus dan vaksin hanyalah hasil rekayasa. Pada saat yang sama, di media sosial Facebook, tersebar narasi dan video yang menyatakan bahwa vaksin Covid-19 mengandung *microchip* magnetik yang akan ditanamkan ke dalam tubuh manusia. Namun, setelah dilakukan penelusuran, klaim mengenai penanaman *microchip* magnetik tersebut tidak memiliki dasar yang benar. Masyarakat diimbau untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak terverifikasi tersebut.

Seorang individu dalam video tersebut mengklaim telah menanamkan sirkuit terpadu mikro di tangan kanan dan kirinya sebelum pandemi Covid-19. Durasi video sekitar 15 menit, namun tidak menyebutkan bahwa penanaman *microchip* magnetik terkait dengan vaksinasi Covid-19. Video diunggah ke Facebook pada 25 Oktober 2021 dan telah mendapatkan 248 tayangan, 43 like, serta 4 komentar. Akun yang mengunggah video tersebut menambahkan keterangan bahwa "semuanya akan terdigitalisasi termasuk tubuh melalui *internet of body* lewat vaksinasi dan uang digital cip implan." Namun, setelah penelusuran, video tersebut ternyata adalah konten dari akun YouTube Yudi Chang yang diunggah pada 24 Agustus 2020 dengan judul "1 *Microchip* Implant Pertama Di Indonesia | Konspirasi Elite Global." Tidak ada kaitan langsung dengan vaksinasi Covid-19, mengingat kegiatan vaksinasi Covid-19 di Indonesia dimulai pada tahun 2021, sedangkan video tersebut telah diunggah sejak Agustus 2020 di kanal YouTube milik Yudi Chang [12].

Fenomena lain berita hoaks terkait Pemilu 2019 memicu perselisihan antar masyarakat yang memiliki preferensi politik berbeda, menyebabkan ketegangan

yang berujung pada kerusuhan yang meresahkan. Situasi tersebut mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan pembatasan penggunaan media sosial guna mengendalikan penyebaran informasi palsu. Terjadinya Pemilu 2019 dipenuhi dengan banyak berita bohong yang memprovokasi ketegangan antarpendukung kandidat. Beberapa contoh berita palsu termasuk klaim tentang surat suara yang sudah tercoblos di beberapa daerah, hasil *quick count* yang dipublikasikan oleh stasiun televisi, dan tuduhan bahwa salah satu pasangan calon menggunakan lembaga survei untuk memenangkan pemilu. Hoaks-hoaks ini memicu pertikaian antarpendukung yang berujung pada unjuk rasa, mengganggu ketenteraman masyarakat yang tak terlibat. Meskipun pemerintah telah menyatakan bahwa berita-berita tersebut sebagai hoaks, dampaknya telah terasa luas. Akibatnya, pemerintah harus membatasi akses media sosial untuk mencegah eskalasi kerusuhan, meski hal ini juga mengganggu rutinitas sehari-hari masyarakat [16].

Pada masa pandemi Covid-19, salah satu kasus yang sangat viral adalah informasi yang tersebar di media sosial mengenai penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menjadi lembaga pertama yang menggunakan vaksin Covid-19. Informasi tersebut juga menyebutkan bahwa seharusnya presiden menjadi pengguna pertama dari vaksin tersebut. Namun, setelah dilakukan penelusuran oleh merdeka.com, terbukti bahwa informasi tersebut adalah hoax.

Sebuah artikel di merdeka.com yang diterbitkan pada tanggal 14 Desember 2020 dengan judul “IDI: Vaksin Alat Terbesar Turunkan Serendah-rendahnya Penularan Covid-19” mengonfirmasi bahwa IDI sebenarnya bersedia menjadi lembaga pertama yang menggunakan vaksin Covid-19. Daeng M. Fafih, Ketua Umum IDI, secara tegas menyatakan bahwa para dokter anggota IDI siap menjadi penerima pertama dari vaksin Covid-19 yang telah memperoleh izin resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Beliau juga menyoroti bahwa berita tentang penolakan vaksinasi Covid-19 oleh IDI bisa mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi yang digulirkan oleh pemerintah. [17].

Penyebaran berita hoaks ini menimbulkan penggiringan opini yang salah, sehingga Masyarakat tidak bersedia untuk dilakukan vaksinasi. Kemudian, timbul lagi berita palsu yang menyatakan jika Masyarakat tidak bersedia untuk divaksin akan dikenakan denda. Informasi ini kemudian diatasi secara langsung oleh Kementerian Kesehatan.

## 2.4 Perbandingan Sistem Deteksi Hoaks

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzaan Rakan Tama dan Yuliant Sibaroni, berjudul “*Fake News (Hoaxes) Detection on Twitter Social Media Content Through Convolutional Neural Network (CNN) Method*”, membandingkan penggunaan dua metode pembobotan, yaitu *Term Frequency-Inverse Document Frequency* (TF-IDF) dan *Term Frequency-Relevance Frequency* (TF-RF), serta dampaknya terhadap akurasi hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan metode pembobotan tersebut memberikan pengaruh yang signifikan pada tingkat akurasi, terutama dalam aspek penggunaan N-gram [18].

Penggunaan metode pembobotan TF-RF memperlihatkan peningkatan nilai akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode TF-IDF. Terutama pada segi penggunaan N-gram, fitur pembobotan TF-RF memberikan hasil yang lebih baik dalam meningkatkan tingkat ketepatan prediksi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa metode pembobotan TF-RF dapat menjadi alternatif yang lebih unggul dalam meningkatkan kualitas prediksi terhadap konten berita hoaks di platform Twitter.

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pemilihan metode pembobotan yang tepat dalam meningkatkan akurasi deteksi hoaks, terutama dalam konteks analisis konten media sosial. Hal ini membantu dalam pengembangan model yang lebih andal dan efektif dalam mengidentifikasi hoaks, memberikan kontribusi penting dalam upaya memerangi penyebaran informasi palsu di lingkungan media sosial. Dalam pengujian, tercatat akurasi tertinggi dari penggunaan trigram mencapai 84.11%. Namun, meski telah menghasilkan nilai akurasi yang tinggi, masih terdapat potensi peningkatan yang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh proses *preprocessing* yang mempertahankan kata-kata yang memiliki kemiripan

serta kehilangan data selama tahap *preprocessing*. Kehilangan data ini mengakibatkan sistem tidak dapat menguji secara maksimal dan menyebabkan penurunan nilai akurasi.

Studi yang berjudul “Penerapan Naïve Bayes Classifier dengan Algoritma Nazief dan Adriani Untuk Deteksi Hoaks” mengimplementasikan Naïve Bayes Classifier sebagai metode untuk mendeteksi hoaks dengan melakukan penyempurnaan pada teknik *stemming* [19]. Melalui pengujian, sistem yang telah dibuat berhasil mencapai tingkat akurasi sebesar 93%, presisi 100%, *recall* sebesar 88%, dan F1-score yang mencapai 93%. Hasil pengujian blackbox menunjukkan bahwa seluruh halaman *website* berfungsi dengan baik, mengindikasikan bahwa sistem deteksi berita hoaks berjalan dengan hasil yang memuaskan dalam performanya.

Penggunaan Naïve Bayes Classifier yang diterapkan dengan algoritma Nazief dan Adriani dalam proses deteksi hoaks telah memberikan hasil yang sangat positif. Tingkat akurasi yang tinggi, presisi, *recall*, dan F1-score yang mencapai nilai optimal menggambarkan efektivitas sistem dalam mengidentifikasi berita hoaks. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan solusi deteksi hoaks yang handal dan terpercaya.

Studi yang berjudul “*Improving Fake News Detection Using K-Means and Support Vector Machine Approaches*” menyajikan hasil yang menarik terkait perbandingan performa dari beberapa metode klasifikasi yang digunakan. Dalam penelitian ini, SVM Classifier menunjukkan hasil presisi yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan metode klasifikasi lainnya, seperti Decision Tree dan Naïve Bayes. Hasil ini menunjukkan bahwa SVM memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengenali berita palsu atau hoaks dibandingkan dengan metode lain yang diuji dalam penelitian tersebut.

Penelitian sebelumnya menyajikan fondasi yang berharga untuk pengembangan penelitian baru terkait penggunaan algoritma K-Means dalam konteks isu pilpres. Dalam kedua penelitian sebelumnya, pendekatan supervised learning telah

digunakan, di mana setiap data pelatihan telah diberi label atau kategori tertentu. Namun, penelitian yang sedang diusulkan ini mengadopsi pendekatan algoritma *unsupervised learning*. Perbedaan kunci di sini adalah bahwa data yang digunakan untuk pengembangan sistem ini belum memiliki label yang ditentukan sebelumnya untuk setiap *cluster* datanya.

Algoritma *unsupervised learning*, seperti K-Means berperan penting dalam kasus ini karena kemampuannya dalam memberikan struktur dan pengelompokan pada data tanpa memerlukan label kategori sebelumnya. Hal ini memungkinkan pengelompokan data berdasarkan pola atau kesamaan yang ditemukan dalam atribut-atributnya, tanpa kebutuhan atas pelabelan yang sudah ada. Sebagai hasilnya, penelitian ini berupaya untuk menciptakan sistem yang mampu secara otomatis mengelompokkan informasi terkait isu pilpres tanpa memerlukan informasi label sebelumnya yang menjadi langkah maju dalam mengaplikasikan algoritma K-Means dalam konteks isu yang sedang dipelajari.

